

BAB II

AMERIKA SERIKAT DAN ORIENTASI POLITIK LUAR NEGERI

AMERIKA SERIKAT DI ISRAEL DAN

Setiap negara menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional. Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional. Dengan demikian, kepentingan nasional terbentuk dari kepentingan domestik dan ketika kepentingan nasional itu dibawa keluar maka saat itu pula kepentingan nasional dikemas dalam politik luar negeri. Masing-masing negara memiliki politik (kebijakan) luar negeri yang partikular, walaupun mungkin di sejumlah negara memiliki kemiripan.

Politik luar negeri merupakan kata lain atau kepanjangan tangan dari politik luar negeri sebuah negara. Demikian pula politik luar negeri Amerika yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lain guna mencapai tujuannya demi kepentingan nasional di bidang luar negeri dan diwujudkan dalam berbagai kegiatan dengan negara lain baik dalam bentuk kerjasama regional maupun internasional. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai Politik luar negeri Amerika, dinamika politik luar negeri Amerika di Timur Tengah, dan Orientasi politik luar negeri Amerika di Israel dan Turki.

A. Politik Luar Negeri Amerika

Bangsa Amerika saat ini adalah kumpulan bangsa-bangsa pendatang yang berasal dari negara-negara Eropa yang mencari kehidupan baru di benua Amerika. Sebagian pendatang tersebut sebagian besar berasal dari Inggris. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Benua Amerika bermula dari proses kolonisasi yang merupakan ciri khas bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-16 dan 17. Para pendatang ini umumnya merupakan orang-orang kebanyakan yang tidak tahan hidup dibawah pemerintahan Inggris yang represif, tidak aman, dan jauh dari kemakmuran. Mereka yang tiba di Amerika adalah orang-orang yang menjadi cikal bakal penduduk Amerika saat ini.¹⁹ Negara ini terletak di Benua Amerika dan di kawasan Amerika Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Kanada, sebelah timur berbatasan dengan Samudera Atlantik, di bagian barat berbatasan dengan Samudera Pasifik dan di bagian selatan berbatasan dengan Mexico dan Laut Karibia.

Amerika Serikat saat ini telah menjadi salah satu negara yang maju di dunia. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali peran Amerika yang mempengaruhi segala keputusan yang menyangkut dunia internasional. Amerika Serikat adalah negara adidaya yang memainkan peran penting dalam tatanan dunia sejak Perang Dunia I, Perang Dunia II, hingga dasawarsa terakhir. Amerika Serikat tidak saja menjadi super power dalam bidang militer dan politik namun juga di bidang ekonomi dan teknologi. Amerika Serikat merupakan sebuah negara berbentuk federal yang terdiri dari 50 negara bagian

¹⁹ Cinta Bambang, *Politik & Pemerintahan Amerika*, Yogyakarta: Lingkar, 2003, Hal 1

dan sebuah distrik federal. Sebanyak 48 negara terletak di Amerika Utara, sementara Alaska terletak di sebelah barat Kanada dan Hawaii terletak di Samudera Pasifik. Amerika Serikat juga memiliki negara koloni seperti Puerto Rico dan Guam yang tergabung dalam persekutuan.

Dalam proses perpolitikan di Amerika Serikat, khususnya politik luar negeri Amerika Serikat, dijalankan berdasarkan kepentingan dalam negerinya. Maka segala kebijakan luar negerinya sedapat mungkin memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan dalam negeri. Hal ini mengingat sejarah berdirinya negara tersebut, Amerika Serikat merasa keamanan dalam negerinya juga merupakan salah satu fungsi diplomatik internasionalnya.

Namun perlu diketahui bahwa dalam membicarakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tentunya sejarah yang telah dilalui oleh Amerika Serikat dalam percaturan politik internasionalnya di masa lalu tidak dapat diabaikan begitu saja. Amerika Serikat sering mengalami penyimpangan dari dasar-dasar politik luar negerinya, walaupun pada dasarnya politik luar negeri Amerika Serikat sendiri memiliki dasar pandangan untuk menciptakan kebebasan dalam hubungan internasionalnya yang damai.

Dalam berpolitik di dalam negeri pemerintah Amerika Serikat nampak sangat menjunjung nilai-nilai demokrasi, terlihat dari bagaimana mereka mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang relative konsekuen. Namun apabila menyangkut politik luar negeri, pemerintah Amerika Serikat kelihatan tidak mengabdikan nilai dan norma demokrasi. Hal itu bisa dilihat dari

kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang menyangkut Dunia Ketiga dan Dunia Islam khususnya yang seringkali membingungkan banyak pihak.

Sejak awal berdirinya Amerika Serikat pada tahun 1776, para pembuat keputusan luar negeri Amerika Serikat selalu mempertimbangkan keadaan dalam negeri dan lingkungan internasional sebagai landasan bagi sikap dan tindakannya dalam melakukan interaksi-interaksi internasional. Politik luar negeri Amerika Serikat mengalami perubahan sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi baik di tingkat domestic maupun di tingkat global. Salah satunya adalah politik isolasionis yang merupakan pilihan para pengambil keputusan di Amerika sepanjang abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Pilihan ini diambil sebagai konsekuensi dari sikap tidak ingin mencampuri urusan bangsa lain. Perang antara bangsa di Eropa pada abad ke-18 dan 19 merupakan factor eksternal yang ikut mendorong tumbuhnya sikap isolasionis tersebut.²⁰ Beberapa karakteristik politik luar negeri Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

1. Isolasionis

Pada tahun 1776 sampai awal abad 20, Amerika menerapkan politik luar negeri yang bersifat isolasionis. Hal ini terlihat dari orientasi kebijakan luar negeri Amerika saat itu, dimana kebijakan Amerika hanya terbatas pada dua tujuan yaitu Amerika menghindarkan diri dari keterlibatan langsung ke dalam persekutuan aliansi militer negara Eropa serta keinginan Amerika untuk memelihara hegemoni politik di bumi barat.

Kebijakan ini didasarkan pada pidato perpisahan pada pidato perpisahan Presiden George Washington pada 17 September 1796 yang antara lain menyatakan “Eropa telah menetapkan kepentingan utama yang bagi kita sama sekali tidak ada atau sangat sedikit hubungannya. Oleh karena itu, Eropa harus terlibat dalam pertentangan yang sering terjadi dan sebab-sebabnya pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan urusan kita. Oleh sebab itu pula, mulai sekarang tidaklah bijaksana kalau kita melibatkan diri dengan ikatan yang palsu dalam perubahan politik mereka yang biasa atau gabungan serta bentrokan bisa jadi persahabatan atau permusuhan.”²¹

Kebijakan luar negeri yang isolasionis, mengakibatkan pada masa sebelum masa Perang Dunia I Amerika relative tidak terlibat dalam percaturan politik dunia. Penerapan politik isolasi tersebut didukung oleh letak geografis Amerika yang dipisahkan oleh samudera luas di kedua sisinya. Letak yang demikian jelas menjauhkan Amerika dari pusat konflik dunia,

2. Netralis

Politik netral merupakan status dimana suatu negara tidak ambil bagian dalam suatu perang dan menempatkan hak dan kewajiban tertentu yang ditujukan pada negara yang sedang berperang. Hal itu adalah langkah yang diambil Amerika dalam menghadapi gejolak perang Eropa yang sedang berkecamuk pada waktu itu.²²

Sikap netral Amerika dilatarbelakangi oleh pidato George Washington yang menyatakan bahwa Amerika akan tetap bersikap netral dalam konflik di

²¹ Morgenthau Hans J. 1985. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. hal 55-56

²² Harwanto. 1993. *Politik Pemerintahan Amerika*. Diktat Kuliah UMY. Hal 82

Eropa. Kebijakan sikap netral tersebut masih dipertahankan pada masa pemerintahan Monroe yang menetapkan "Garis kebijakan kita yang pertama dan utama ialah bahwa kita tidak akan pernah melibatkan diri dalam kancah pertikaian di Eropa, tidak membolehkan Eropa mencampuri masalah Atlantik Amerika Utara dan Selatan.

3. Ekspansionis

Kemauan untuk melakukan ekspansi didukung oleh keberhasilan dari dalam negeri yang mampu membangun kekuatan politik dan ekonomi yang sangat dinamis serta dibarengi dengan penyebaran berbagai gagasan reformasi internasional.

Sifat ekspansif ini salah satunya ditujukan dengan menganeksasi kepulauan Hawaii, dalam rangka menduduki Philipina melalui perang Spanyol yang diikuti dengan mengklaim Guam dan Samoa. Dalam kurang dari setengah abad, Amerika telah memperoleh konsesi wilayah dari Inggris di perbatasan Kanada membeli wilayah Louisiana dari Napoleon, dan memaksa Spanyol untuk menyerahkan Florida.

4. Intervensionis

Dengan masuknya Amerika ke dalam arena perpolitikan dunia, menandai adanya pergeseran arah kebijakan politik Amerika. Pergeseran kebijakan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Eropa telah gagal menjaga ketertiban dan kestabilan dunia.

Kebijakan intervensionis sebenarnya telah dimulai sejak masa pemerintahan Woodrow Wilson, yaitu saat kapal Amerika ditenggelamkan oleh

tentara Jerman. Pada awalnya kebijakan tersebut ditolak oleh rakyat Amerika yang lebih menghendaki pelaksanaan isolasionisme. Namun, setelah Amerika Serikat dihadapkan pada kenyataan bahwa keamanan Amerika sendiri tidak terjamin pada masa Perang Dunia II, maka Amerika harus segera mengambil tindakan kongkrit untuk mengatasinya.

Kebijakan intervensi tersebut semakin kelihatan lagi setelah usainya Perang Dunia II. Amerika menganggap intervensi ini ditujukan untuk mencegah pengaruh ideology lain yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga Amerika tidak segan-segan melakukan tindakan atau intervensi dengan dalih untuk menjaga jalannya demokrasi.²³ Alasan inilah yang menyebabkan Amerika melakukan antisipasi terhadap pengaruh paham komunis Uni Soviet melalui politik pembendungan yang dicetuskan oleh Presiden Harry S. Truman yang terkenal dengan "doktrin Truman".

5. Ambiguous (Sikap Ganda)

Sikap ambiguous Amerika ini tidak konsisten dengan politik luar negerinya di awal perkembangannya. Sikap tersebut banyak terjadi pasca Perang Dunia II atau pada masa Perang Dingin hingga sekarang. Dalam sikapnya ini, Amerika seringkali mengesampingkan nilai-nilai demokratis. Hal ini tentu sangat kontradiktif dengan apa yang selalu dikampanyekan dan

didengung-dengungkan oleh Amerika sebagai negara yang paling demokratis dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁴

Dari karakteristik-karakteristik politik luar negeri Amerika tersebut, bisa dilihat sekarang bahwa politik luar negeri Amerika sering mengalami pergeseran dalam arah kebijakan luar negerinya. Dalam perpolitikannya di Timur Tengah, Amerika terlihat sekali menekankan politik luar negerinya yang bersifat intervensionis dan ambiguanis. Intervensionis ini bisa dilihat dari sisi Amerika yang selalu ingin mengintervensi dan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Hal ini selalu dilakukan oleh Amerika ketika Amerika merasa kepentingan nasionalnya terancam. Terutama untuk kawasan Timur Tengah yang mana Amerika memiliki keinginan untuk mempunyai kekuatan yang berpengaruh di kawasan tersebut. Ini tentu saja berkaitan dengan kepentingan Amerika yang sadar akan betapa strategisnya negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Karakteristik politik luar negeri ambiguanis atau sikap ganda Amerika terlihat ketika politik luar negeri Amerika di Timur Tengah terasa tidak konsisten dengan nilai-nilai demokratis. Artinya, bahwa seringkali para perancang politik luar negeri Amerika terlalu sering terjebak kedalam arogansi kekuasaan. Dengan demikian, dalam berhubungan dengan sebuah negara Amerika tidak mampu melakukan empati. Maksudnya adalah Amerika merasa tidak perlu melihat suatu masalah dari sudut pandang pihak lain dan seakan-akan apa yang dikehendaki oleh Amerika harus menjadi kenyataan. Hal ini

tentu saja sangat berbeda dengan apa yang selalu didengung-dengungkan oleh Amerika mengenai nilai-nilai demokrasi yaitu selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Dinamika Politik Luar Negeri Amerika di Timur Tengah

Hubungan antara Amerika dan Timur Tengah dapat dibagi ke dalam tiga periode yang berbeda, yang pertama berakhir pada tahun 1941, yang kedua selama periode perang 1941-1945, dan yang ketiga setelah tahun 1945.

1. Periode pertama yang berakhir tahun 1941

Dalam periode pertama, Amerika tidak menunjukkan minat politis yang tetap terhadap wilayah ini. Sejak dulu orang Amerika yang mencurahkan perhatian secara serius pada Timur Tengah hanyalah misionaris Protestan dan pendidik. Lembaga seperti American University of Beirut, Universitas Amerika di Kairo, Robert College, dan American Women's College di Istanbul, serta sekolah-sekolah lanjutan yang dikenal sebagai college di Teheran dan Baghdad yang mana hal ini membuktikan adanya hubungan budaya antara Dunia Baru dan Tanah Injil Kuno. Semua lembaga ini membuat Amerika populer di mata orang yang telah mengadakan hubungan dengan lembaga tersebut, dan kenyataan bahwa pemerintah Amerika tidak mempunyai alasan politik untuk melaksanakan kegiatan lembaga tersebut semakin memperkuat itikad baik umum terhadap demokrasi Amerika

Peristiwa pertama intervensi politik Amerika terjadi pada tahun 1918-1919 pada waktu Penyelesaian Perdamaian.²⁵ Butir 12 dari 14 butir Wilson secara khusus berkaitan dengan pembagian Imperium Uthmaniyah dan prinsip umum penentuan nasib sendiri nasional yang tercantum di dalamnya memberikan kesan mendalam kepada kaum cendekiawan di Timur Tengah. Karena ingin sekali melaksanakan prinsipnya, Presiden Wilson mengirimkan dua misi ke Timur Tengah untuk mengetahui dengan pasti kehendak rakyat yang langsung bersangkutan. Kedua misi tersebut adalah misi King-Crane ke Suriah dan Palestina dan misi Harbord ke Armenia. Akan tetapi, drama kekuasaan politik di Paris menggagalkan rencana Wilson. Setelah kematian Wilson dan penghapusan perjanjian Versailles, Amerika menarik diri dari politik dunia sehingga menyerahkan Timur Tengah kepada muslihat mereka sendiri

Perhatian Amerika selanjutnya terhadap kawasan Timur Tengah adalah bersifat sporadis. Amerika memusatkan perhatiannya pada masalah ekonomi sebagai satu-satunya masalah yang berarti, bersikeras mempertahankan prinsip pintu terbuka terutama di wilayah mandat Inggris. Pada tahun 1924, dibuat persetujuan Inggris-Amerika mengenai persamaan peluang di Palestina. Di pihak lain, penemuan minyak di Irak menyebabkan perbedaan pendapat antara Perusahaan Amerika Serikat dan Inggris tentang barang rampasan Turkish Petroleum Company Pra-perang. Perbedaan pendapat ini semakin rumit karena kelompok Amerika lain, yang dikenal sebagai

Ottoman-American Development Company yang diketuai oleh Admiral Chester, berusaha meratifikasi konsesi lamanya di Turki (1909) yang gagal pada tahun 1913 akibat tentangan Inggris dan Jerman.

Pada 9 April 1923 Turki memberikan konsesi eksklusif mineral, jalan kereta api, dan minyak kepada Chester mulai dari Ankara hingga melewati Mosul dan perbatasan Rusia yang mana wilayah Mosul ini merupakan wilayah yang kontroversial. Pada tahun 1922, Standar Oil Company dari New Jersey mencapai persetujuan dengan Inggris dimana perusahaan tersebut mendapat bagian 25 persen dari sumber minyak Irak, yang berarti ia mendapat kepentingan tetap dalam kendali Inggris atas Mosul. Kedua kelompok industri ini mengharapkan dukungan pemerintahnya, dan untuk sementara Amerika terlihat terseret ke dalam kontroversi politik yang tidak menyenangkan. Karena perlu diketahui bahwa selama dua tahun perkara itu ditangguhkan karena Perjanjian Lausanne tidak dapat menyelesaikan secara pasti masalah Mosul ini. Hingga pada tahun 1925, dengan penyerahan wilayah sengketa Irak itu oleh Dewan LBB, hak Chester otomatis tidak diakui.²⁶ Hal ini memberikan peluang ke arah tercapainya persetujuan yang pasti antara kelompok perusahaan minyak Amerika dan pemerintah Inggris. Persetujuan mendapat restu dari Departemen Luar Negeri karena mencerminkan prinsip pintu terbuka.

Di luar masalah ekonomi ini, perhatian Amerika tertarik ke Timur Tengah adalah dalam hubungannya dengan masalah Palestina. Lahirnya

Deklarasi Balfour 1917 adalah akibat pengaruh kaum Yahudi Amerika yang didukung oleh sikap bersahabat pemerintahnya. Adanya pemberian mandat tersebut, malah membuat perhatian resmi Amerika terhadap Palestina agak berkurang karena menganggap bahwa mandat itu pada dasarnya untuk memenuhi aspirasi Zionis.

Dua faktor lain yang menyebabkan berkurangnya perhatian Amerika adalah adanya kenyataan bahwa kepemimpinan Zionisme Dunia berada di tangan Yahudi Inggris bukan Yahudi Amerika dan kenyataan bahwa hingga tahun 1939 Inggris tidak secara drastis membatasi imigrasi Yahudi ke Palestina sehingga membiarkan tumbuhnya tanah air Yahudi. Jadi bisa dikatakan bahwa pendekatan politik luar negeri Amerika kepada Timur Tengah sampai tahun 1941 dapat digambarkan sebagai tidak acuh, beritikad baik, dan yakin bahwa wilayah ini menjadi perlindungan Inggris dimana tidak ada kepentingan utama Amerika yang terlibat. Bahkan masuknya perusahaan minyak Amerika, konsesi di Irak, Bahrain, dan Arab Saudi tidak mengubah sikap menjauhkan diri ini.

2. Periode kedua (selama perang tahun 1941-1945)

Akibat dari adanya kedaruratan perang, maka selama periode kedua ini Amerika mendadak mengembangkan hubungan bergandanya dengan Timur Tengah. Urusan di kawasan ini tidak lagi hanya urusan Inggris tetapi pasukan Amerika juga muncul di Iran untuk menangani masalah suplai ke Rusia. Mereka juga datang ke Mesir dan Palestina terutama untuk

menyelesaikan berbagai tugas teknis yang berkaitan dengan kendaraan lapis baja Amerika yang menjadi perlengkapan Inggris. Angkatan laut dan armada niaga Amerika memegang peran penting dalam pengiriman perlengkapan ke medan perang Timur Tengah. ikatan militer dengan kawasan ini diperkuat juga oleh beberpa tindakan ekonomi, antara lain Amerika memberikan pinjam-sewa kepada banyak negara di Timur Tengah, memberikan dukungan aktif dan bimbingan kepada Pusat Suplai Timur Tengah, serta memberikan perhatian aktif terhadap pengaturan sementara mengenai produksi minyak. Terutama untuk melayani keperluan strategis Amerika di Timur Jauh, Anglo-Iranian Oil Company menyesuaikan fasilitasnya untuk menghasilkan minyak oktan tinggi bagi pesawat terbang.

Pada tahun 1943, Harold Ickes seorang administrator autoritas minyak Amerika, menganjurkan partisipasi aktif pemerintah dalam pipa yang diproyeksikan melalui padang pasir Arabia. Tanggung jawab Amerika dalam hal ini berkembang sampai suatu tingkat sehingga pada tahun 1944 pemerintah Amerika mengangkat seorang pajabat tinggi yaitu James Landis sebagai menteri ekonomi Amerika untuk Timur Tengah.pada waktu yang sama, pemerintah membentuk pos atase perminyakan untuk seluruh kawasan yang menjadi bagian dari kedubes Amerika di Kairo.

Pemerintah Amerika menjadi lebih waspada terhadap masalah politik di Timur Tengah. Beberapa pejabat tinggi Amerika seperti Kolonel Donovan (direktur Biro Dinas Strategi), Werdell Willkie (wakil pribadi presiden) dan

Dubes Hariman mengunjungi kawasan ini selama perang.²⁷ Pada masa itu Amerika telah menunjukkan sikapnya yang bersahabat dan membantu Arab Saudi pada saat terjadinya krisis ekonomi, serta kepada Suriah dan Lebanon dalam perjuangan kemerdekaan mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa selama periode perang ini, Amerika mulai mengembangkan minatnya ke kawasan Timur Tengah. Hubungan Amerika ke Timur Tengah mulai berkembang dan bersahabat hingga membuat Amerika mulai memasukan kebijakan politik luar negerinya ke dalam isu militer, politik, dan ekonomi.

3. Periode ketiga (Pasca Perang setelah tahun 1945)

Dalam periode pasca perang ini, peningkatan perhatian Amerika terhadap kawasan Timur Tengah semakin meluas. Minyak, Palestina, dan ancaman Soviet merupakan tiga jalan bagi pendekatan Amerika terhadap Timur Tengah. perkembangan yang mengagumkan adalah dalam produksi minyak di Arab Saudi dan Kuwait serta dengan saham-saham Amerika di Bahrain, Irak, dan Mesir yang semakin menyadarkan para pemimpin Amerika akan pentingnya kawasan strategis ini. Penolakan Deklarasi Balfour oleh Inggris lewat Naskah Putih pada tahun 1939 dan perselisihan di Palestina menyebabkan Amerika perlu menetapkan posisinya di kawasan Timur Tengah. Selain itu, pertumbuhan ekspansionisme Soviet telah memaksa Washington untuk merumuskan kebijakan dan mengambil langkah untuk melindungi Timur Tengah dan mengamankan kepentingan vital Barat di

Ujian pertama terjadi di Iran yaitu pada tahun 1945-1946 ketika Rusia berusaha menundukkan negeri itu lewat dukungannya kepada pemberontakan Azerbaijan dan pemilikan konsesi minyak dengan paksa. Reaksi Amerika ialah mendorong Iran untuk melawan tekanan Rusia dan seperti yang diungkapkan oleh Presiden Truman yang memperingatkan Rusia atas aksi agresifnya lebih lanjut. Krisis Iran belum berakhir, tetapi Amerika dihadapkan pada ancaman komunis baru, kali ini terhadap Yunani dan Turki. Kelemahan dan kemiskinan yang terjadi di kedua negara tersebut akibat Perang Dunia II mengharuskan Inggris menarik dukungannya kepada negara-negara ini sehingga menimbulkan kekosongan kekuasaan yang berbahaya. Adanya hal tersebut membuat Presiden Truman menyatakan bahwa Amerika bersedia untuk menyelamatkan kedua negara yang terancam itu dengan menjanjikan bantuan keuangan bagi tujuan ekonomi dan militer. Pernyataan kebijakan resmi itu dikenal dengan sebutan Doktrin Truman. Bunyi Doktrin Truman tersebut adalah :

...Eksistensi negara Yunani saat ini terancam oleh kegiatan teroris yang terdiri atas beberapa ribu orang bersenjata, dipimpin oleh komunis, yang menentang wewenang pemerintah di sejumlah tempat, terutama di sepanjang perbatasan utara." Adapun bagi Turki, "Integritasnya penting untuk memelihara ketertiban di Timur Tengah"

Setelah menetapkan tujuan Amerika, Presiden memohon wewenang dari Kongres untuk memberikan bantuan kepada Yunani dan Turki sebesar \$400.000.000 dan mengirimkan personel militer dan sipil ke kedua negara itu untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan program bantuan itu. Ini merupakan langkah besar pertama yang dilakukan oleh Amerika dalam

mengakui dan menanggapi ancaman Soviet. Pencantuman Yunani dan Turki dalam Marshal Plan berikutnya serta pengakuan mereka sebagai anggota NATO pada tahun 1950 merupakan hasil logis dari pernyataan kebijakan dasar yang pertama ini. Doktrin Truman itu terbukti berhasil, beberapa buktinya antara lain bantuan dan dana yang diberikan Amerika kepada Yunani menyebabkan pemerintahnya berhasil menghalau gerilya komunis dan menyelamatkan dirinya dari nasib yang kurang beruntung seperti yang dialami oleh tetangga-tetangganya di Balkan, demikian juga pada Turki yang dengan adanya kebijakan tersebut Turki diperkuat ekonomi dan sikap militernya serta berhasil menahan tekanan Soviet untuk untuk mengontrol Selat dan menganeksasi provinsi-provinsi timurnya sehingga barisan utara bisa diselamatkan.

Dengan adanya keberhasilan ini serta keinginan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan regional yang dipolakan pada aliansi NATO, Washington ingin menarik negara-negara Arab ke dalam rencana kerjasama militer yang lebih luas yang akan meliputi kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Namun, dalam hal ini kebijakan Amerika mendapat tanggapan negative. Mesir, menolak menerima usul Komando Timur Tengah yang disponsori Barat dan mengumumkan kebijakan netralisme positif. Pusat-pusat Arab nasionalis lainnya meniru contoh Mesir. Alasan keengganan Arab dapat dirangkumkan sebagai berikut:

a. Dunia Arab belum menerima eksistensi Israel yang dipandang sebagai

rintisan dan nos dengan imperialism Barat

- b. Sisa-sisa kolonialisme Eropa Barat di Dunia Arab dipandang sebagai ancaman yang lebih besar bagi kemerdekaan dan kesejahteraan Arab daripada imperialisme Soviet yang tampaknya jauh
- c. Nasionalis Arab benci akan kemungkinan hubungan klien-majikan yang akan diminta oleh kerjasama militer dengan Barat, dan curiga hal itu akan menjadi alat neokolonialisme
- d. Mereka ingin melindungi negara-negara mereka agar tidak menjadi ajang pertempuran sebagai akibat kemungkinan perluasan perang ke wilayah mereka pada masa yang akan datang.

Karena gagal di Inti Arab di Timur Tengah, Washington kembali ke kawasan di mana selalu ada kesadaran akan ancaman Soviet, yakni Barisan Utara. Hasil dari kebijakan ini adalah Pakta Baghdad. Amerika mempersatukan tiga negara non-Arab (Turki, Iran, dan Pakistan), satu Arab (Irak), dan satu Barat (Inggris) dalam satu aliansi militer. Disini Amerika tidak bergabung secara resmi karena khawatir diasingkan oleh rezim revolusioner Mesir dan semua unsur Dunia Arab yang mengikutinya. Tujuan dari adanya Pakta Baghdad ini adalah pada bidang pertahanan yang mencakup seluruh Timur Tengah termasuk bagian Arabnya. Tetapi yang terjadi adalah Pakta Baghdad hanya berhasil sebagian dan bahkan diragukan. Penyebabnya adalah dari segi militer dimana komitmen Barat untuk mempertahankan negara-negara Barisan Utara lebih penting daripada kerjasama di antara negara-negara Pakta Baghdad. Meskipun Pakta juga menyajikan kerjasama teknik dan ekonomi di antara anggotanya, kerjasama demikian dapat dilakukan melalui

persetujuan khusus yang terpisah dari aspek militer dan arena itu tidak dipengaruhi oleh tentangan keras yang diciptakan oleh Pakta di pusat-pusat netralis nasionalisme Arab.

Dimulai dengan Pakta Baghdad, Amerika dihadapkan pada reaksi berantai gerakan politik yang memperdalam jurang antar Amerika dan nasionalis Arab. Perjanjian senjata Moskwa-Kairo adalah peristiwa besar kedua dalam kisah sedih ini, yang diikuti dengan penarikan tawaran Bendungan Aswan, nasionalisasi Terusan Suez, dan Perang Suez. Dalam perang tersebut Amerika tampil untuk membela korban agresi, Mesir. Dalam hal ini, sebenarnya ada periode singkat dimana pengakuan atas sikap Amerika dan ucapan terima kasih untuk itu diucapkan oleh Nasser dan nasionalis Arab lainnya. Perolehan ini segera disusul oleh dua tindakan kebijakan Amerika, yang pertama yaitu pengesahan prinsip kebebasan pelayaran di Teluk Aqaba dan Menlu Dulles dan yang kedua adalah pernyataan politik Presiden tetanggal 5 Januari 1957 yang dikenal sebagai Doktrin Eisenhower.

Asal mula dikeluarkannya Doktrin itu disebabkan oleh kekhawatiran Washington terhadap penetrasi komunis internasional ke Dunia Arab segera setelah berakhirnya Perang Suez, runtuhnya pengaruh Inggris di kawasan ini, dan juga bangkitnya kembali permusuhan nasionalis Arab terhadap Barat. Meskipun secara resmi ditujukan ke seluruh Timur Tengah, deklarasi ini terutama ditujukan ke Dunia Arab dimana kemajuan Soviet dan kegiatan partai Komunis lokal paling mencolok. Atau bisa dikatakan bahwa Doktrin ini melengkapi Doktrin Truman yang berpusat pada ancaman Soviet terhadap

Barisan Utara non-Arab. Doktrin baru ini berbeda dalam satu hal yang penting demi menyempurnakan doktrin yang lama yaitu mengaitkan kesatuam-kesatuan Amerika dalam mempertahankan negara-negara yang terancam.

Namun yang terjadi adalah Doktrin ini mendapat kecaman keras di Kairo, Damaskus, dan lingkungan militant Pan-Arab lain di Timur Tengah. Argument mereka adalah bahwa Amerika berusaha mempertahankan Arab dari bahaya khayal agresi Soviet, sedangkan bahaya yang nyata dari kehadiran Israel dan ambisi Inggris-Prancis yang baru saja usai perang dengan Mesir ditutup-tutupi. Dengan demikian, alasan mereka adalah doktrin itu hanya menutupi maksud Amerika guna memasukkan angkatan bersenjata ke Timur Arab dan mungkin membantu beberapa rezim yang tak disukai agar tetap berkuasa melawan gerakan progresif pembebasan nasional. Tidak semua Dunia Arab menolak adanya doktrin ini, tetapi Irak, Arab Saudi, dan Lebanon menerima doktrin ini. Dengan mendramatisasi situasi di Timur Tengah, doktrin ini cenderung membantu membangkitkan kesadaran rakyat Amerika terhadap bahaya kondisi yang tidak diselesaikan di kawasan itu dan membujuk mereka untuk lebih memikirkan dari segi kepentingan nasional.

Pemberian bantuan dan hibah kepada negara-negara netral seperti India, Afganistan, dan Mesir serta negara-negara di kawasan Timur Tengah juga merupakan salah satu bentuk politik luar negeri Amerika. Pinjaman dan hibah Amerika tentu saja sering diberikan untuk membiayai proyek khusus atau pembangunan dengan syarat pengerjaannya harus diawasi dengan ketat oleh

Tim gabungan Amerika lokal untuk mencegah pemborosan, penggelapan, dan ketidakefisienan.

Dalam menangani negara-negara Timur Tengah, Amerika membagi perhatian bersama dengan negara-negara Barat terkemuka yang diikat dengan persekutuan yang vital. Namun adanya hal ini nyatanya membuat Amerika sering menderita dalam pandangan bangsa Timur Tengah karena kesalahannya yaitu berhubungan dengan negara-negara Eropa Barat yang memiliki reputasi kolonialis.²⁸

Jadi bisa dikatakan bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia II perhatian Amerika pada kawasan Timur Tengah meningkat secara cepat. Masa ini bersamaan dengan surutnya kekuatan Inggris sebagai major power tidak saja di Timur Tengah tetapi juga ditingkat internasional pada umumnya. Selain itu, produksi minyak yang melimpah dari kawasan Arab semakin meyakinkan Amerika akan arti strategisnya kawasan Timur Tengah. Seperti yang telah disebutkan pada sub-bab sebelumnya bahwa kebijakan luar negeri Amerika sering mengalami perubahan. Hingga pada periode pasca perang, Amerika semakin memperlihatkan sifat intervensi dan ambiguitasnya. Amerika terlihat melakukan apa saja demi mendapatkan kepentingannya di kawasan tersebut. Amerika semakin mendekati negara-negara di Timur Tengah yang dianggapnya memiliki nilai strategis bagi Amerika terutama negara yang dapat membantunya untuk bisa memiliki kekuatan yang berpengaruh di kawasan tersebut. Dari sini Amerika mulai mendekati beberapa negara seperti Israel

dan Turki yang mana bagi Amerika kedua negara ini memiliki arti penting tersendiri.

Setelah periode pasca perang tersebut, Amerika Serikat memiliki banyak hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Adanya hubungan diplomatik tersebut, secara tidak langsung menggambarkan adanya kepentingan-kepentingan nasional Amerika di Timur Tengah. Secara umum, kepentingan nasional Amerika di Timur Tengah pada pokoknya adalah berupa :

1. Mengusahakan agar sumber-sumber alam Timur Tengah tidak jatuh ke tangan musuh
2. Menjamin tersalurnya sumber-sumber alam yang penting bagi industry dan militer Amerika dan sekutunya
3. Memelihara kontinuitas mengalirnya keuntungan investasi dan usaha-usaha komersial Amerika
4. Menjaga kredibilitas dengan jalan memenuhi komitmen Amerika di Timur Tengah
5. Menjaga eksistensi pengusaha-pengusaha Timur Tengah yang menjadi sekutu Amerika
6. Mempertahankan diri dari ancaman komunis (masa perang dingin) dan kekuatan-kekuatan revolusioner atau fundamentalisme islam yang

dapat membahayakan dominasi pengaruh Amerika dan persekutuan Barat di kawasan Timur Tengah.²⁹

C. Orientasi Politik Luar Negeri Amerika di Israel dan Turki

Semenjak periode pasca perang, Amerika semakin meningkatkan minat politisnya terhadap kawasan Timur Tengah. Dari sini Amerika semakin mengembangkan arah kebijakan luar negerinya ke negara-negara di kawasan tersebut. Beberapa negara di kawasan Timur Tengah dianggap memiliki arti yang penting bagi Amerika, yaitu seperti Israel dan Turki. Hal tersebut tentu saja disertai dengan kepentingan Amerika di kedua negara tersebut.

1. Orientasi Politik Luar Negeri Amerika di Israel

Persahabatan antara Amerika Serikat dan Israel merupakan gambaran penting hubungan Israel dengan negara-negara besar di dunia. Banyak sekali kebijakan-kebijakan Amerika yang pro-Israel. Pengaruh Amerika Serikat sangat besar bagi tercapainya resolusi PBB tentang pembagian wilayah antara Israel dengan Palestina dan Amerika Serikat lah yang pertama kali mengakui negara baru Yahudi ini. Pada bulan Januari 1949 Amerika memberi pengakuan penuh secara *de jure* dan menunjuk tokoh terkenal pro-Zionis, Dr. James G. Mc Donald sebagai duta besar Amerika Serikat pertama di Tel-Aviv.³⁰ Dari hal ini, Israel banyak mengharapkan dan memperoleh bantuan ekonomi dari Amerika Serikat.

²⁹ Jatmika, Sidik. 2004. *Politik Timur Tengah (Bahan Ajar Perkuliahan)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal 101

Hubungan antara Israel dengan Amerika Serikat semakin meningkat ketika Barrack Obama terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Kedua negara ini semakin yakin bahwa keduanya akan semakin erat untuk meningkatkan keamanan vital diantara Amerika Serikat dan Israel. Karena perlu diketahui bahwa semua pemerintahan Amerika Serikat telah mendukung Israel dari segi politik, keamanan, dan ekonomi karena kedua negara ini sama-sama memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang sama dimana hal inilah yang sering disebut sebagai landasan politik luar negerinya terhadap Israel..

Citra yang dibangun para pengambil kebijakan luar negeri AS terhadap Israel selama ini adalah bahwa Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikepung negara-negara Arab yang memusuhinya. Israel diposisikan sebagai negara yang harus terus-menerus membela diri dari serangan teroris dan karena itulah AS berkewajiban untuk membantu Israel. Kepentingan nasional adalah yang selama ini dipakai oleh para petinggi AS dalam menjustifikasi pembelaan mereka terhadap Israel.

Tujuan utama kebijakan luar negeri Amerika di Israel adalah mengubah kawasan Timur Tengah menjadi satu gabungan “Lingkungan Kesejahteraan Bersama” Amerika Serikat-Israel. Hal tersebut adalah sebuah proyek yang disamarkan dengan mengajukan demokrasi di Timur Tengah melalui moncong senjata AS.³¹

Dalam hubungannya dengan Israel, Amerika merasa sangat penting untuk memasukkan ideologi Zionis dalam kerangka konteks hubungan Israel dan

³¹ *Journal of International Law and Politics*, 2008, 41, 1, 1-15.

Amerika serta pengaruh kuat lobi pro-Israel ke dalam negeri Amerika. Hal tersebut semata-mata dilakukan adalah untuk membentuk kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah dan wilayah lainnya. Hubungan Amerika dan Israel telah digambarkan dengan beragam cara. Para politisi menganggap Israel sebagai sekutu Amerika yang paling kuat di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Amerika juga menganggap bahwa Israel adalah sekutu yang strategis. Amerika menyatakan bahwa kedua negara ini berbagi nilai-nilai demokrasi yang sama dalam perang melawan terorisme.

Oleh Amerika, Israel dijadikan sebagai alat imperium Amerika untuk merongrong nasionalisme Arab dan juga sebagai benteng pertahanan melawan terorisme Islam fundamentalis.³² Hubungan antara Amerika-Israel adalah sebuah kekuatan regional. Tidak seperti hubungan antara Washington dan Uni Eropa, Jepang, dan Oceania, tetapi justru Israel yang menekan dan memperoleh transfer dalam jumlah besar dari sumber-sumber keuangan dimana hingga tahun 2004 Israel mendapatkan 2,8 miliar per tahun dan 84 miliar dolar selama 30 tahun.³³ Israel juga mendapatkan transfer senjata dan teknologi terbaru, jalur masuk ke pasar-pasar Amerika, dan hak bebas masuk untuk imigran. Negara itu juga mendapatkan komitmen dukungan Amerika tanpa syarat dalam hal perang dan tekanan terhadap warga yang dikolonisasi serta jaminan veto Amerika terhadap resolusi PBB yang kritis.

³² Ibid. hal 51

³³ "US Financial Aid to Israel: Facts, Figures, and Impacts" *Washington Report on Middle East*

Dari jaringan –jaringan luar negerinya, negara Israel dapat secara langsung ikut campur dan menetapkan parameter bantuan luar negeri Amerika di Timur Tengah. jaringan-jaringan luar negeri itu memainkan satu peran besar dalam membentuk perdebatan internal tentang kebijakan Amerika terhadap Israel.³⁴

Demi melancarkan orientasi politik luar negerinya di Israel, Amerika berkomitmen untuk memberikan banyak bantuan kepada negara Zionis ini. Dalam masyarakat Amerika, dukungan Yahudi untuk Israel diberikan kepada beberapa sektor yang pada akhirnya hal tersebut berbalik menjadi dukungan untuk Israel oleh pemerintah Amerika. Seperti catatan Taklimat isu CRS “ Israel mendapatkan perlakuan istimewa dan keuntungan khusus dari program bantuan Amerika yang mungkin tidak diberikan kepada negara-negara lain”.

Data dibawah ini dikumpulkan oleh Taklimat isu CRS tahun 2004 yang memberikan catatan tentang sejauh mana tingkat bantuan Amerika dan fitur-fitur khususnya :

- a) Israel telah menerima lebih dari 90 miliar dolar dana bantuan Amerika hingga tahun 2003. Dana sebesar 75 miliar dolar berbentuk dana bantuan (tidak perlu dikembalikan) dan 15 juta dolar berbetuk utang.
- b) Sejak 1885, Amerika telah menyediakan 3 miliar dolar dalam bentuk dana bantuan setia tahun untuk Israel.
- c) Bantuan pemukiman kembali untuk imigran Soviet dan Ethiopia mencapai puncaknya pada tahun 1992 dengan jumlah 80 miliar dolar.

Namun, subsidi dilanjutkan hingga 60 miliar dolar pada 2003, 50 miliar dolar pada 2004, dan sekali lagi pada tahun 2005.

- d) Pada 1990, Israel meminta 10 miliar dolar dalam bentuk jaminan utang, yang memungkinkan Israel meminjam dari perusahaan-perusahaan komersial Amerika, dengan dijamin oleh pemerintah Amerika bahwa utang mereka tidak akan gagal. Pada 2004, jaminan utang sebesar 9 miliar dolar dikururkan kembali.
- e) Semua bantuan ekonomi berubah menjadi dana bantuan transfer tunai pada tahun 1981 dan demikian juga dengan bantuan militer pada 1985.

Selain itu, Amerika telah mendukung perkembangan industry militer dan pertahanan Israel, antara lain melalui tindakan-tindakan berikut ini:

- a) Dana 625 juta dolar untuk mengembangkan dan menyebarkan anti-misil siluman Arrow.
- b) Dana 1,8 miliar dolar untuk mengembangkan pesawat Lavi. Pada 20 Agustus 1987, cabinet Israel memilih untuk membatalkan proyek Lavi, tetapi meminta Amerika untuk membayar 450 juta dolar karena kontrak yang dibatalkan itu. Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat setuju menaikkan usulan FMF untuk pengadaan di Israel dari 300 juta dolar menjadi 400 juta dolar guna membiayai ongkos pembatalan Lavi.
- c) Bantuan militer Amerika untuk pembelian perangkat militer di Israel yaitu sebesar 26,3%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2004, dana bantuan militer sebesar 568 juta dolar dapat dihabiskan di Israel (sebagian besar

bantuan militer Amerika digunakan untuk membeli persenjataan Amerika).³⁵

Dukungan lebih jauh diberikan melalui jaminan pemerintah Amerika kepada Israel untuk mengakses minyak, melalui Memorandum of Agreement Israel-Amerika pada tanggal 1 September 1975. Menurut Ed Vuillamy, yang menulis untuk the London Observer:

...Memorandum itu telah diperbaharui secara diam-diam setiap lima tahun, dengan undang-undang khusus yang tercantum di dalamnya, yaitu Amerika menimbun cadangan minyak strategis untuk Israel. Padahal, hal itu mengakibatkan kekurangan di dalam negeri—dengan biaya 3 miliar pada 2002 yang dibebankan pada wajib pajak Amerika.³⁶

Telah diketahui bahwa Amerika sangat menjaga hubungannya dengan Israel. Ikatan yang kuat antara Amerika dan Israel sudah umum diketahui. Aliansi antara Amerika dan Israel didasarkan pada kesamaan kepentingan dan kesamaan nilai-nilai. Jadi bisa dikatakan siapa yang mengancam Israel maka mengancam pula Amerika. Sehingga Amerika berkomitmen bahwa akan membawa Gedung Putih bagi keamanan Israel. Komitmen tersebut dimulai dengan menjamin bantuan militer bagi Israel.

2. Orientasi Politik Luar Negeri Amerika di Turki

Hubungan persahabatan antara Amerika Serikat dengan Turki dimulai pada saat adanya pengekanan Soviet terhadap Turki. Adanya imperialisme Soviet membuat Amerika bersikap tanggap atas apa yang terjadi di Turki. Pada

³⁵ Ibid hal 71

³⁶ Ed Vuillamy, "Israel Seeks Pipeline for Iraqi Oil", The Observer, 23 April 2003

saat itu, pengekan Soviet tidak hanya terjadi pada Turki tetapi juga pada Yunani. Hal itu membuat Amerika Serikat menganggap bahwa memelihara kemerdekaan Yunani dan Turki penting sekali bagi keamanan Amerika Serikat. Hal ini merupakan komitmen besar Amerika Serikat pertama bagi Timur Tengah yang bersifat semimiliter, Dari hal tersebut Kongres mulai melakukan tindakan untuk menanggapi. Hingga pertengahan Mei 1947, Kongres Amerika Serikat mulai menyetujui pengeluaran sebesar \$400.000.000 dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer dimana \$100.000.000 diberikan kepada Turki. Hal ini menandai era tumbuhnya kepentingan Amerika di Turki. Pada tanggal 2 Mei 1947 unsur-unsur armada mediterania Amerika berkunjung ke Istanbul dan memberi semangat dan propaganda pro-Amerika.

Hubungan diplomatik antara Amerika dan Turki semakin meningkat ketika pada bulan Juni 1947 misi militer Amerika Serikat tiba di Ankara dan menjadi wakil tetap diplomasinya. Tidak hanya itu saja, hubungan antara kedua negara ini semakin meningkat dengan adanya kerjasama dalam hal pembangunan infrastruktur negara. Program kerjasama itu disebut Program Perbaikan Eropa. Disahkannya Program Perbaikan Eropa oleh Kongres mempererat hubungan kedua negara sehingga Turki termasuk ke dalam enam belas negara yang memperoleh bantuan Amerika. Misi tetap bagi Administrasi Kerja Sama Eropa

antara kedua negara ini tidak hanya di bidang infrastruktur negara, tetapi juga dalam bidang budaya, militer, dan juga ekonomi.³⁷

Perundingan atas prakarsa Amerika mengenai Perjanjian Atlantik Utara pada 4 April 1949 meningkatkan minat Turki untuk bergabung dengan sekutu di samping Yunani. Tetapi ketika mitra Atlantik Utara belum siap menyebarkan komitmen mereka, menlu Amerika Dean Acheson menyatakan bahwa Amerika akan meneruskan memelihara keamanan bangsa-bangsa Timur Tengah, khususnya Yunani, Turki, dan Iran. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kekhawatiran Turki.

Dalam menerapkan kebijakan luar negerinya di Turki, orientasi politik luar negeri Amerika yang utama adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Posisi Turki dalam konflik Timur Tengah memang sangat krusial. Turki berperan penting dalam Perang Irak, karena negeri itu berbatasan langsung dengan Irak utara, sehingga pasukan AS bisa masuk ke Irak melalui Turki. Sejumlah pasukan Turki kini bertugas di Afganistan, bergabung dengan pasukan NATO untuk melawan Taliban dan Al Qaida. Terkait konflik Palestina-Israel, Turki ambil peranan dengan mengupayakan perundingan Israel-Syria. Bila Syria mau berdamai dengan Israel, artinya, musuh penting Israel akan berkurang satu lagi.

Orientasi politik luar negeri Amerika terhadap Turki juga dibarengi dengan berbagai kerjasama diantara keduanya. Pada tanggal 27 Desember 1949, Amerika dan Turki menyetujui kerjasama budaya yang menetapkan penggunaan \$5.000.000 bagi pertukaran pelajar. Pada bulan Mei 1950, Departemen Luar

³⁷ Lepczowski, George 1993. *Timur Tengah Di Tengah Kancah Dunia*. Bandung: Sinar Baru

Negeri mengumumkan bahwa selama tiga tahun di bawah Doktrin Truman dan Marshall Plan, Yunani dan Turki telah menerima sejumlah \$700.000 bantuan militer dan \$764.000.000 bantuan ekonomi. Sebulan kemudian ECA mengumumkan telah mengalokasikan \$275.000 bagi Turki untuk membangun proyek rehabilitasi perkapalan.³⁸

Bagi Amerika, Turki memiliki peranan yang penting. Selain sebagai sekutu yang signifikan bagi Amerika, Turki adalah anggota NATO dengan jumlah pasukan terbesar setelah Amerika Serikat. Sehingga dengan adanya hal tersebut, Turki sangat memiliki nilai strategis bagi Amerika. Amerika merupakan rekan kerjasama yang penting bagi Turki terutama dalam hal kerjasama pertahanan dan keamanan, di antaranya melakukan operasi bersama dalam misi pemberantasan terorisme dan PKK di wilayah Turki bagian Timur. Sebagai komitmen Amerika dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya dengan Turki, Amerika menjadi penyedia senjata terbesar bagi Turki dimana sekitar 80% dari seluruh aktivitas industri pertahanan Turki dijalankan bersama Amerika. Amerika juga merupakan salah satu pendukung utama atas beberapa kegiatan strategis yang dijalankan oleh Turki seperti pembangunan pipa minyak Baku-Ceyhan yang bertujuan untuk membawa minyak dari Laut Kaspia ke pasar internasional melalui pantai Mediterania. Selain itu Amerika juga telah memberikan dukungannya terhadap Turki atas permohonan negara tersebut untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa.³⁹

³⁸ Ibid hal 101

³⁹ Ridwan Herdiawan.2013. *Kepentingan Turki Dalam Penempatan Sistem Pertahanan Anti Misil- Riset NATO di Turki*. *Journal Ilmu Hubungan Internasional* Vol 1 No 1

Bukti konkret terjalannya keharmonisan hubungan Amerika-Turki, Barack Obama menjadikan Turki sebagai negara Islam pertama yang dikunjungi setelah pelantikannya menjadi Presiden dan satu-satunya negara euro-asia yang dicantumkan secara khusus dalam kampanye Obama tahun 2007 dalam promosi kebijakan politik luar negeri.⁴⁰ Tidak heran bila Obama memilih Turki untuk menyampaikan pesannya kepada Dunia Islam dan sekaligus membujuk Turki untuk bergabung dalam agenda Washington terkait berbagai konflik Timur Tengah.

Dari paparan diatas bisa dilihat bahwa Amerika memiliki kepentingan khusus di kawasan Timur Tengah terutama di negara-negara yang dianggap penting bagi Amerika seperti Israel dan Turki. Hal tersebut tentu saja disertai dengan kepentingan nasional Amerika terhadap negara-negara tersebut. Hubungan diplomatic juga terjalin di antara Israel dan Turki. Adanya hubungan diplomatic antara Israel dan Turki membuat Amerika terlibat dalam relasi kedua negara tersebut. Namun tidak selamanya hubungan diplomatic antara kedua negara itu berjalan harmonis, hingga Amerika merasa perlu untuk terlibat diantara keduanya. Pada bab selanjutnya akan menjelaskan mengenai dinamika hubungan diplomatic Israel dan Turki, pada sebelum terjadinya tragedi penyerangan kapal Mavi Marmara dan setelah terjadinya penyerangan kapal Mavi Marmara hingga membuat kedua negara ini memutuskan hubungan diplomatiknya.